

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Keagenan

Teori keagenan memiliki prinsip utama berupa hubungan kerja antara dua pihak yaitu pihak yang memberikan wewenang (*principal*) dengan pihak yang menerima wewenang (*agensi*) dalam suatu bentuk kerjasama yang dinamakan dengan “*nexus of contract*”. Agen berperan sebagai pihak yang diberikan kontrak oleh principal untuk bekerja sesuai dengan kepentingan principal. Dalam teori keagenan (*agency theory*) dijelaskan mengenai hubungan antara *principal dan agent* (Jensen & Meckling, 2019) mengartikan bahwa teori keagenan adalah hubungan yang muncul ketika satu pihak memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada pihak lain (*agent*) untuk melakukan pengambilan kewenangan dan tanggung jawab kepada pihak lain untuk melakukan pengambilan keputusan sesuai kepentingan principal.

Teori keagenan juga dapat diterapkan pada *sector public*. Negara yang demokrasi memiliki hubungan keagenan antara masyarakat dengan pemerintah atau hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memberikan wewenang terhadap pemerintah daerah pemerintah daerah juga harus mempertanggung jawabkan tugasnya terhadap pemerintah pusat. Disisi lain pemerintah daerah juga harus memaksimalkan kesejahteraan mereka. Pada *sector public* hubungan keagenan tersebut juga dapat dilihat dalam penyusunan anggaran. Pemerintah daerah disini provinsi menyusun anggaran kemudian anggaran tersebut diserahkan kepusat setelah adanya pengesahan dari pusat pemerintah daerah menjalankan kegiatan berdasarkan anggaran tadi. Akhirnya pemerintah daerah harus mempertanggung jawabkan realisasi anggaran terhadap pemerintah pusat. Selain hubungan pemerintah pusat dan daerah juga ada hubungan antara legislative dan eksekutif, eksekutif adalah agen sedangkan legislative adalah principal (Halim: 2007). Legislator adalah pihak yang mendelegasikan wewenang kepada agen seperti pemerintah atau panitia di legislative untuk membuat kebijakan baru. Agen disini membuat usulan kebijakan dan nantinya usulan agen tersebut diterima atau di tolak.

Menurut Mardiasmo (2006) akuntabilitas publik, pihak yang diberikan amanah (agen) mempunyai kewajiban berupa tanggung jawab untuk melaporkan, mencatat serta mengungkapkan segala kegiatan dan aktivitas yang merupakan tanggung jawabnya kepada principal sebagai pihak pemberi amanah dimana pihak principal ini mempunyai hak untuk menagih hal tersebut. Akuntabilitas publik terbagi menjadi dua yaitu:

1. akuntabilitas vertical yaitu suatu bentuk tanggung jawab atas penggunaan dana kepada pihak yang lebih tinggi, dan
2. akuntabilitas horizontal yaitu suatu bentuk tanggung jawab atas penggunaan dana kepada masyarakat luas.

Keterkaitan adanya *agency theory* dalam penelitian ini dapat dilihat dalam pelaporan keuangan, yang dimana pemerintah disini bertindak sebagai pihak yang diberi amanah (agen) maka berkewajiban untuk mengungkapkan segala informasi yang dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan sebagai pengguna informasi yang dimana bertindak sebagai principal untuk menilai akuntabilitas dan memutuskan kebijakan sosial, politik, maupun ekonomi baik terlibat secara langsung maupun tidak langsung melalui wakil-wakilnya. Hubungan antara pemerintah dan para pemangku kepentingan sebagai pengguna informasi laporan keuangan dapat dikaitkan adanya hubungan keagenan.

2.2 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2015) laporan keuangan dalam Standar Akuntansi Keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut misalnya informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga. Pada kesimpulannya pengertian laporan keuangan merupakan dokumen yang

memberikan informasi pencatatan dari segala transaksi yang berkaitan dengan uang, pembelian dan penjualan serta kredit. Laporan keuangan juga berfungsi untuk mengetahui keadaan finansial suatu perusahaan, sehingga laporan keuangan yang dibuat dapat secara detail, tepat dan dengan perhitungan yang baik (PSAK No. 1 (2015:2))

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2015) tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan serta kerugian, kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik dan arus kas.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah yaitu sebagai berikut :

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran merupakan laporan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Informasi yang disajikan mengenai realisasi pendapatan, belanja, penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pemerintah pusat/daerah.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi mengenai kenaikan dan penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c. Neraca

Neraca merupakan laporan yang menyajikan mengenai aset, kewajiban serta ekuitas pada akhir periode tertentu.

d. Laporan Operasional

Laporan operasional merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional berupa ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas serta penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode.

e. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas merupakan laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris. Laporan arus kas juga menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.

f. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

g. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi mengenai penjelasan pospos laporan keuangan yang disajikan, informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta informasi mengenai ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Laporan keuangan yang dimaksud yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas.

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukannya (Said dan Noch, 2018). Sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 laporan keuangan yang disusun harus

memenuhi prinsip-prinsip. Laporan keuangan menentukan nilai sumber daya ekonomi yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dikatakan berkualitas apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan terbebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan fakta secara jujur serta dapat diverifikasi. Informasi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) juga dikatakan berkualitas dan bermanfaat apabila informasi tersebut berguna oleh para penggunanya. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan kualitas informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu hasil proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang di jadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggung jawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan (Rasdianto, 2013).

Definisi laporan keuangan adalah suatu bentuk laporan dari segala aktivitas transaksi yang telah dilakukan dalam periode waktu tertentu. Laporan keuangan sebenarnya merupakan pernyataan dari pihak manajemen pemerintah dalam menginformasikan kondisi keuangan pemerintah kepada para pemangku kepentingan selain itu pembuatan laporan keuangan membantu pemerintah dalam memenuhi akuntabilitas terhadap publik. Pembuatan laporan keuangan bertujuan untuk membagi informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang memiliki pengaruh terhadap kepentingan umum.

Dibuatnya laporan keuangan itu sendiri harus mampu memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dalam menentukan keputusan baik itu keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Laporan keuangan dikatakan baik dan berkualitas apabila 16 memenuhi karakteristik kualitatif. Karakteristik kualitatif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 antara lain:

1. Relevan, yaitu informasi yang terkandung dalam laporan keuangan berguna bagi pengguna sehingga membantu dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini maupun masa depan. Terdapat unsur-unsur dari informasi yang relevan, antara lain:
 - a) Manfaat umpan balik (*feedback value*) Informasi dapat digunakan pengguna untuk mengoreksi keputusan di masa lalu.
 - b) Manfaat predictif (*predictive value*) Informasi dapat digunakan pengguna dalam memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan masa kini.
 - c) Tepat waktu (*timeliness*) Penyajian laporan keuangan tepat waktu sesuai dengan periode akuntansi.
 - d) Lengkap Penyajian mengenai segala aktivitas dan segala kegiatan yang berkaitan dengan pengeluaran dalam pemerintah daerah disajikan secara utuh tanpa adanya manipulasi sehingga dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan.
2. Andal, merupakan suatu bentuk penyajian informasi yang bebas dari unsur penyesatan dan kesalahan salah saji material. Karakteristik andal antara lain:
 - a) Jujur dalam penyajian Informasi tentang penyajian dari setiap transaksi dan peristiwa yang terjadi disajikan dengan jujur.
 - b) Dapat diverifikasi Penyajian dalam laporan keuangan dapat dilakukan pengujian ulang tanpa merubah hasilnya.
 - c) Netralitas Informasi yang disajikan tidak berpihak pada kepentingan tertentu tetapi untuk kebutuhan umum.
3. Dapat dibandingkan, adalah suatu bentuk perbandingan antara periode sekarang dengan periode sebelumnya, maupun dibandingkan dengan organisasi lain yang bergerak di bidang yang sama.
4. Dapat dipahami, adalah pengguna mampu memahami isi dari laporan keuangan dengan baik.

2.3 Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1)

Kompetensi sumber daya manusia adalah kompetensi yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan karakteristik kepribadian yang memengaruhi secara langsung terhadap kinerjanya (Mangkunegara, 2012) menurut

Warisno, (2008) dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten, yang didukung dengan latar belakang Pendidikan akuntansi, sering mengikuti Pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan, hal tersebut diperlukan untuk menerapkan sistem akuntansi yang ada.

Terdapat perbedaan pengertian antara *competence* dan *competency*, dimana *competence* itu sendiri merupakan kegiatan yang memiliki hubungan dengan pekerjaan “wilayah kerja dimana orang dapat menjadi kompeten atau unggul” pengertian *competency* itu sendiri adalah kegiatan yang berkaitan dengan orang “dimensi perilaku yang melandasi prestasi unggul (*competent*)”. Jadi kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan yang dimiliki oleh individu dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan utama organisasi. Terdapat tiga komponen utama dalam membentuk kompetensi menurut Hutapea dan Thoha (2008), yaitu :

- a) Pengetahuan (*knowledge*) merupakan tingkat pengetahuan seseorang dalam bidang kompetensi yang dimiliki sehingga mampu menjalankan tugas dan kewajibannya.
- b) Keterampilan (*skill*) adalah upaya yang dilakukan seseorang dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan kemampuan terbaiknya.
- c) Sikap (*attitude*) adalah pola tindakan seseorang karyawan dalam menjalankan tugas dan kewajiban tanpa harus melanggar peraturan yang berlaku.

Menurut Uha, Ismail (2014) Langkah -langkah yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas Pendidikan formal PNS menuju pengembangan Mengoptimalkan diklat dan peningkatan bintek untuk mewujudkan kompetensi dan keterampilan teknis.
2. Penyusunan standar kompetensi jabatan dalam menempatkan aparatur sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
3. Pembinaan karier PNS yang terstruktur, professional, dengan pola pikir general dan kerja secara special dalam riil produksi.
4. Pengembangan jabatan fungsional menuju spesialisasi dengan kebutuhan tuntutan kerja.pembangunan dan membangun wawasan keilmuan.

Dalam mewujudkan upaya dalam pencapaian tujuan organisasi, sumber daya manusia (SDM) merupakan elemen dari organisasi yang memiliki peranan sangat penting. Untuk menerapkan sistem akuntansi, sumber daya manusia yang berkualitas (SDM) yang berkualitas tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Jika sumber daya manusia mengalami kegagalan maka akan berdampak kekeliruan pada laporan keuangan yang di buat dan ketidak sesuaian laporan dengan standar yang di tetapkan pemerintah (Jultri, 2021). Untuk mewujudkan upaya pencapaian tujuan organisasi, sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Jika sumber daya manusia gagal, maka akan mengakibatkan kesalahan dalam laporan keuangan yang di buat dan tidak sesuai dengan standar yang di tetapkan pemerintah.

(Destiana, 2014) Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor penting demi terciptanya laporan keuangan yang berkualitas. Keberhasilan suatu entitas bukan hanya di pengaruhi oleh Sumber Daya Manusia yang dimilikinya. Jadi, jika sumber daya manusia memiliki keahlian dibidangnya maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.4 Standar Akuntansi Pemerintah Daerah (X2)

Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan dan dasar yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Standar akuntansi pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam Menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010). Standar akuntansi pemerintahan adalah syarat mutlak yang harus dijadikan pedoman agar kualitas laporan keuangan di Indonesia dapat ditingkatkan. Standar Akuntansi Pemerintah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan.

Standar Akuntansi Pemerintahan digunakan sebagai suatu pedoman dasar dalam melaksanakan mekanisme akuntansi pemerintah. Pengertian akuntansi menurut *American Accounting Association* (1966) seperti yang dikutip Abdul Halim dan

Muhammad Syam Kusufi (2014), akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi/entitas yang dijadikan sebagai informan dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.

Pembuatan laporan keuangan pemerintah daerah yang mengikuti prinsip-prinsip yang tertuang dalam SAP akan menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang lebih berkualitas. Penelitian (Wati dkk, 2014) menyimpulkan bahwa penerapan SAP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang di hasilkan Menurut (Nordiawan, 2006), “bahwa adanya pengaruh antara standar akuntansi pemerintahan pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu SAP diterapkan dilingkup pemerintahan, baik di pemerintah pusat dan departemen-departemennya maupun di pemerintah daerah dan dinas-dinasnya, penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah.

Menurut Sinaga (2005), Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna, dan auditor. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah yang merupakan hasil dari proses akuntansi yang berpedoman pada SAP diharapkan dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan *stakeholder* sehingga tercipta pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

2.5 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah(X3)

Sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007).

Prosedur yang dimaksud adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) suatu organisasi. Yang dimaksud dengan proses pengidentifikasian adalah pengidentifikasian ekonomi, agar dapat membedakan mana transaksi yang bersifat ekonomi dan mana yang

tidak. Pada dasarnya transaksi ekonomi adalah aktivitas yang berhubungan dengan uang. Proses selanjutnya adalah pengukuran transaksi ekonomi, yaitu dengan menggunakan satuan uang. Proses tersebut menggunakan sistem pencatatan dan dasar akuntansi tertentu. Pelaporan transaksi ekonomi akan menghasilkan laporan keuangan yang merupakan hasil akhir proses akuntansi.

Menurut Halim (2008) definisi akuntansi pemerintah daerah yang disebutnya sebagai akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang dijadikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal pemda (kabupaten, kota, / provinsi) .

Menurut Mardiasmo (2004) akuntansi merupakan aktivitas jasa untuk menyediakan informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan.akuntansi keuangan dapat didefinisikan sebagai prinsip, metode, dan Teknik pencatatanpengorganisasian data keuangan atas kegiatan suatu entitas untuk menghasilkan dan memberikan informasi, sehingga digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi yang rasional.

Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu subsistem dari organisasi yang memfasilitasi kontrol dengan melaporkan kinerja pemerintah daerah. Ruang lingkup sistem akuntansi keuangan daerah mencakup diantaranya kebijakan akuntansi, prosedur sistem akuntansi, sumber daya manusia, serta teknologi informasi. Tujuan dari diterapkannya sistem akuntansi keuangan daerah adalah untuk menyediakan informasi keuangan yang lengkap, cermat dan akurat sehingga dapat menghasilkan suatu laporan keuangan yang handal, dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan oleh berbagai pihak eksternal yang membutuhkan.

Akuntansi keuangan daerah adalah serangkaian mekanisme teknis dan analisis akuntansi yang diterapkan pada lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen yang ada di bawahnya seperti pemda, BUMD, BUMN, LSM, yayasan sosial, serta proyek-proyek kerjasama antar sektor publik dan sektor swasta Bastian

(2007). Menurut Halim (2012) bahwa “akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pencatatan, pengukuran, dan pelaporan transaksi ekonomi dari entitas pemerintah daerah seperti kabupaten, kota atau wilayah provinsi yang memerlukan”. Hasil informasi keuangan yang dilaporkan tersebut bertujuan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak eksternal. Pernyataan Halim di atas menjelaskan bahwa akuntansi keuangan daerah ialah suatu cara metode yang digunakan untuk mencatat hasil dari transaksi-transaksi yang terjadi dalam 1 waktu periode di suatu instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah.

Akuntansi menyediakan informasi yang kuantitatif yang bersifat keuangan. Menurut Halim dan Kusufi (2012) “akuntansi adalah suatu sistem. Suatu sistem mengolah data *input* (masukan) adalah bukti-bukti transaksi dalam bentuk dokumen atau formulir dan *output* (keluaran) adalah laporan keuangan”. Sistem akuntansi adalah prosedur-prosedur yang harus dilaksanakan untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak di dalam dan di luar organisasi dalam rangka pengambilan keputusan.

Lebih lanjut dikatakan, dalam konteks akuntansi keuangan daerah terdapat Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD). Berikut beberapa pengertian SAKD menurut para ahli dan peraturan menteri dalam negeri. Menurut Permendagri No.13 tahun 2006 bahwa Sistem akuntansi keuangan daerah adalah serangkaian prosedur yang dapat dilakukan secara manual ataupun menggunakan bantuan komputer yang mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan berakhir pada pelaporan keuangan yang dilakukan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Menurut Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 bahwa sistem akuntansi keuangan daerah merupakan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan daerah.

Sedangkan Erlina (2015) menyatakan bahwa SAKD adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau

kejadian keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli dan peraturan di atas maka dapat dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan sistem akuntansi keuangan daerah adalah suatu prosedur yang dimulai dari pengumpulan data sampai dengan pelaporan keuangan dengan menggunakan sistem dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

2.6 Penelitian Terdahulu

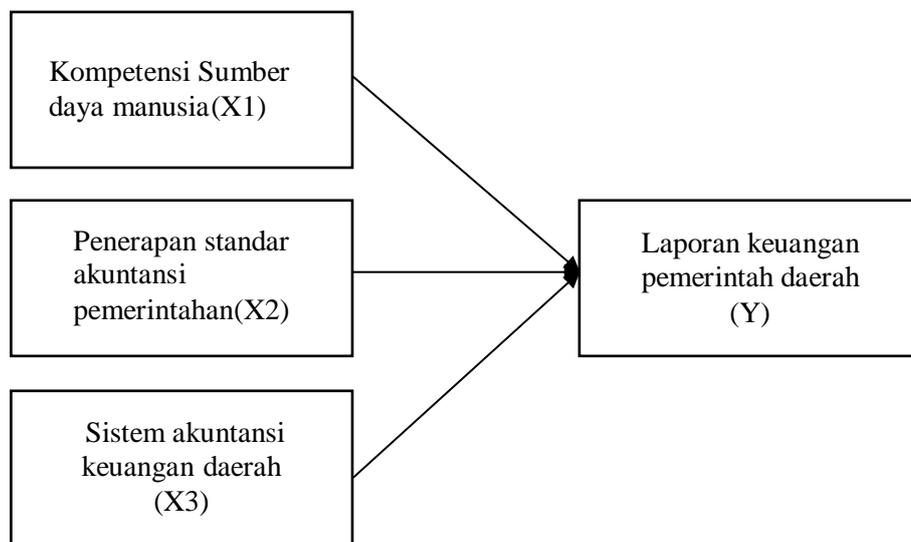
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Fitri Purnama (2019)	Pengaruh kompetensi sumberdaya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dan kompetensi sumber daya manusia, standar akuntansi pemerintahan, sistem akuntansi keuangan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
2.	Antonia Jultri (2021)	Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah dan <i>new public manajement</i> terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.	Kompetensi SDM, penerapan SAP, penerapan SAKD dan <i>new public managemnent</i> secara “simultan” berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah, penerapan system akuntansi keuangan daerah (SAKD) secara parsial berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah, <i>new public management</i> secara parsial berpengaruh terhadap kualitas keuangan pemerintah.
3.	Mona Nur Adhillah (2022)	Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar Akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian intern terhadap	Kesimpulan yang didapat dari analisis dan pembahasan data yaitu kompetensi sumberdaya manusia secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di OPD pemerintah provinsi Sumatera Selatan Sistem pengendalian

		kualitas laporan keuangan.	intern secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di ODP pemerintah provinsi Sumatera Selatan
4.	Yusrahusimi(2016)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Empat Lawan Sumatera Selatan.	Berdasarkan hasil pengujian Secara parsial variable kompetensi SDM dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Berdasarkan pengujian secara simultan kompetensi SDM dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada SKPD di kabupaten Empat Lawan.
5.	Abdul Hakim (2017)	Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) dan sistem pengendalian interen terhadap Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.	Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Artinya, semakin baik kompetensi sumber daya manusia, maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 2. penerapan sistem akuntansi Keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Artinya, semakin baik penerapan Sistem akuntansi keuangan daerah, akan meningkatkan. 3. sistem pengendalian interen pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Artinya, semakin baik sistem pengendalian interen pemerintah yang dijalankan oleh SKPD, akan meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah.
6.	Launtu Ansir (2021)	Pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah dan kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten Gowa

		pemerintah kabupaten Gowa.	<p>2. Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Gowa.</p> <p>3. Penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah dan kualitas sumber daya manusia secara simultan berpengaruh positif</p>
--	--	----------------------------	--

2.7 Kerangka Pemikiran



Tabel 2.1 Kerangka Pemikiran.

2.8 Bangunan Hipotesis

2.8.1 Pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor penting demi terciptanya laporan keuangan yang berkualitas. Keberhasilan suatu entitas bukan hanya di pengaruhi oleh Sumber Daya Manusia yang dimilikinya. Jadi, jika sumber daya manusia memiliki keahlian dibidangnya maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kompetensi Sumber Daya Manusia merupakan kemampuan yang dimiliki seorang pegawai yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam menyelesaikan kinerjanya sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi akan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara efisien dan efektif. Adanya sumber daya manusia maka akan mendukung ketepatan waktu dalam pembuatan laporan keuangan.

Penelitian Adhilah (2022) dan Purnamasari (2019) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, dapat dirumuskan bahwa hipotesis pertama yaitu:

H1 : Kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.8.2 Pengaruh standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

penerapan SAP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang di hasilkan. Menurut Nordiawan (2006), “bahwa adanya pengaruh antara standar akuntansi pemerintahan pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu SAP diterapkan dilingkup pemerintahan, baik di pemerintah pusat dan departemen-departemennya maupun di pemerintah daerah dan dinas-dinasnya, penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah.

Pembuatan laporan keuangan pemerintah daerah yang mengikuti prinsip-prinsip yang tertuang dalam SAP akan menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang lebih berkualitas.

Penelitian Adhillah (2022) dan Purnamasari (2019) yang berjudul “kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah dan system pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan” menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa hiptesis kedua yaitu:

H2 : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.8.3 Pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini didukung oleh landasan teori yang menyebutkan bahwa untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang handal. Sistem akuntansi yang lemah akan menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan.

Penelitian Hakim (2017) dan Purnamasari (2019) yang berjudul “pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan system akuntansi keuangan daerah dan system pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah” menyatakan bahwa penerapan system akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, dapat dirumuskan bahwa hipotesis ketiga dari penelitian ini yaitu:

H3 : Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.